

## PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS SOSIAL

Jalan Pahlawan Nomor 4A- Kode Pos 56214
Telpon/Faksimile (0293) 491129 SuratElektronik : dinsostmg@yahoo.com

## PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD	DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG			
TAHUN ANGGARAN PROGRAM	2025 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak			
T KOOKAM	Kekerasan			
KEGIATAN	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasar			
	dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk			
SUB KEGIATAN	Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			
SOD REGIATAN	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota			
	untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			
KODE PROGRAM	Kode Kegiatan sesuai RKA-SKPD			
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)     Data Umum     Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Tahun 2022			
	Jml L P			
	Jiwa			
	Simu			
	10 0 10			
	<ul> <li>Akses Jumlah penerima manfaat dari layanan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan tahun 2022 sebanyak 2 (L = 0, P=10) Waktu pelaksanaan layanan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan pada Januari- Desember Tahun 2022 sesuai kasus yang ada.</li> <li>Partisipasi Jumlah personil yang terlibat dalam pelaksanaan: - PPTK: 1 orang (L: 0, P: 1)</li> <li>Kontrol - Jumlah pejabat eselon 2 (Kepala Dinas) pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sejumlah 1 (satu) orang (L) - Jumlah pejabat eselon 3 (Sekretaris, Kabid) pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sejumlah 1 (tiga) orang terdiri dari L: 1 P. 1</li> <li>Manfaat - Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang sebagaian besar mengalami hambatan dalam Fasilitasi</li> </ul>			

untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, sehingga kegiatan ini bermanfaat bagi Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan agar mendapatkan pelayanan sosial sesuai kebutuhan, masalah dan potensi yang dimiliki.

 Keluarga miskin baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial

### 2. Issu dan Faktor Kesenjangan Gender

- a. Faktor Kesenjangan disebabkan oleh masih adanya anggapan bahwa laki-laki yang harus diprioritaskan dalam kegiatan-kegiatan, karena laki-laki sebagai tulang punggung keluarga sedangkan perempuan lebih berfungsi sebagai ibu rumahtangga.
- b. Rendahnya SDM perempuan dikarenakan kurangnya pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki dan adanya pengaruh budaya bahwa "perempuan akhirnya akan kedapur, sumur dan kasur" yang berarti bahwa perempuan itu tdak perlu mengejar pendidikan atau karir tinggi-tinggi karena akhirnya akan menjadi ibu rumahtangga juga.

#### Akses

- Persentase penerima manfaat berjenis kelamin perempuan mempunyai persentase yang lebih tinggi dibanding laki-laki.
- Persentase pejabat eselon maupun fungsional perempuan di Dinas Sosial lebih tinggi dari laki-laki

### Partisipasi dan kontrol

- Narasumber ditentukan oleh institusi sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan sehingga membuka peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan
- Kewenangan pengambilan keputusan untuk hasil evaluasi lebih ditentukan oleh perempuan.

#### c. Penyebab Internal

- Perencanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran tidak biasa dipilah jumlah sasarannya karena bersifat respon kasus
- Kegiatan belum didukung anggaran yang memadai untuk mencapai hasil yang maksimal

### d. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender

- Kurangnya koordinasi yang intensif antara tim driver TAPD dalam penyusunan RKA berbasis gender dalam E-planning maupun E-Budgeting.
- Kurangnya dukungan TAPD dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan RKA yang telah diusulkan oleh OPD.

#### **RENCANA AKSI**

Kegiatan

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

### Tujuan

Memberikan penanganan secara konstruktif kepada bagi Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal yang kondisinya

		tidak mampu agar mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.		
	Aktivitas	<ul> <li>Melakukan koordinasi dan penjangkauan</li> <li>Melakukan asesmen kasus</li> <li>Menyusun rencana intervensi</li> <li>Melaksanakan intervensi sesuai hasil asesmen</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi</li> </ul>		
		Dana : Rp.20.000.000,-		
	Sumbon	Panitia : Bidang Rehabilitasi Sosial		
	Sumber Daya (Inputs)	Trainer :Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial Praktisi		
		Penerima: berdasarkan respon kasus		
		Sarana prasarana :Laptop, ATK.		
	Output	Rumusan Kinerja Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan penerima sesuai dengan respon kasus.		
		Indikator Kinerja Prosentase penerima layanan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan komposisi PPRG sebesar 100 % ( dengan asumsi anggaran yang tersedia maksimal untuk penanagan yang ada)		

Kabupaten Temanggung

HERI KARDONO, S.STP

DINSOS

Pembina Tingkat I NIP. 19790709 199912 1 001



## PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS SOSIAL

JalanPahlawan Nomor 4A- Kode Pos 56214
Telpon/Faksimile (0293) 491129 SuratElektronik : dinsostmg@yahoo.com

### MATRIKS LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

KOLOM 1	SKPD	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung				
	Program	<ul> <li>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</li> </ul>				
	Kegiatan	<ul> <li>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</li> </ul>				
	Sub Kegitan	<ul> <li>Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</li> </ul>				
	Tujuan	<ul> <li>Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</li> </ul>				
KOLOM 2	Data Pembuka Wawasan ( <i>Data</i> <i>Pilah Gender</i> )	<ul> <li>Data Umum         Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak         Kekerasan yang mendapatkan bantuan sosial         Tahun 2022     </li> </ul>				
		Jml L P Jiwa				
		10 0 10				
		Akses     Jumlah penerima manfaat dari layanan Fasilitasi     Pemulangan Warga Negara Migran Korban     Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah     Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke     Desa/Kelurahan Asal tahun 2022 sebanyak 10(L     =, P=10)     Waktu pelaksanaan layanan Fasilitasi     Pemulangan Warga Negara Migran Korban     Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah     Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke     Desa/Kelurahan Asal pada Januari-Desember     Tahun 2022 sesuai kasus yang ada.  Partisipasi     Jumlah personil yang terlibat dalam pelaksanaan  Pimtak i				
		Bimtek : - PPTK: 1 orang ( L : 0 , P : 1)				

Langkah 3		Faktor	• !	Kontrol Jumlah pejabat eselon 2 (Kepala Dinas) pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sejumlah 1 (satu) orang (L) Jumlah pejabat eselon 3 (Sekretaris, Kabid) pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sejumlah 1 (tiga) orang terdiri dari L: 0 P. 2  Manfaat Klien Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal yang sebagaian besar mengalami hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga kegiatan ini bermanfaat bagi bagi Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal agar mendapatkan pelayanan sosial sesuai kebutuhan, masalah dan potensi yang dimiliki. Keluarga miskin baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial
Langkah 3	ISU GENDER	Faktor Kesenjang- an/ Permasalaha n Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat	• [	Akses - Persentase penerima manfaat berjenis kelamin perempuan mempunyai persentase yang lebih tinggi dibanding laki-laki - Persentase pejabat struktural maupun fungsional perempuan di Dinas Sosial lebih tinggi dari laki-laki Partisipasi dan kontrol - Narasumber ditentukan oleh institusi sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki Kewenangan pengambilan keputusan untuk hasil evaluasi lebih ditentukan oleh perempuan. Manfaat - Berkurangnya isu gender dalam pelaksanaan kegiatan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal bagi penerima manfaat.
Langkah 4		Sebab Kesenjang- an Internal (di SKPD)	•	Perencanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran tidak bisa dipilah jumlah sasarannya karena bersifat respon kasus Kegiatan belum didukung anggaran yang memadai untuk mecapai hasil yang maksimal
Langkah 5		Sebab Ke- senjangan External	(Dir pen mai Kur ang	rangnya koordinasi yang intensif antara tim driver nasSosial, Bappeda, BPPKAD) dalam nyusunan RKA berbasis gender dalam E-planning upun E-Budgeting rangnya dukungan TAPD dalam mengalokasikan ngaran sesuai dengan RKA yang telah diusulkan n OPD.

Langkah 6	Tujuan Responsif Gender		<ul> <li>Memastikan OPD telah menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran dengan memberikan akses yang sama antara perempuan dan laki-laki</li> <li>Tingkat kesejahteraan bagi Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal meningkat</li> <li>Mendukung terlaksananya tujuan pembangunan nasional</li> </ul>
Langkah 7	Pri	ncana Aksi oritas/Kegiata ndikator	<ol> <li>Melakukan pelayanan sosial bagi Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</li> <li>Melaksanakan Kegiatan bagi Klien Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal yang mengalami permasalahan sosial.</li> </ol>
Langkah 8	lis	Output	<ul> <li>Rumusan Kinerja</li> <li>Terlaksananya pelayanan sosial, bagi Klien Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan peserta yang telah menerapkan PPRG</li> <li>Indikator Kinerja         Prosentase layanan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan komposisi PPRG sebesar 100 % (dengan asumsi anggaran yang tersedia maksimal untuk penanagan 100% kasus)     </li> </ul>
	Pengukuran Hasil	Outcome	<ul> <li>Rumusan Kinerja         <ul> <li>Terlaksananya layanan Fasilitasi Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal yang responsif gender yaitu laki-laki dan perempuan memiliki peluang akses yang sama.</li> </ul> </li> <li>Indikator Kinerja         <ul> <li>Meningkatnya keberfungsiansosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Klien Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal bermasalah untuk terbebas dari masalah yang dihadapi oleh diri dan keluarganya.</li></ul></li></ul>

untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Temanggung, 20 Maret 2024 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I ANIP 19790709 199912 1 001



## PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS SOSIAL

JalanPahlawan Nomor 4A- Kode Pos 56214
Telpon/Faksimile (0293) 491129 SuratElektronik : dinsostmg@yahoo.com

## PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

	(GENDER BUDGE	ISIAIL	WLIVI)			
SKPD TAHUN ANGGARAN	DINAS SOSIAL KA 2025	ABUPATE	EN TEMAI	NGGUNG		
PROGRAM		Program Rehabilitasi Sosial				
KEGIATAN		r, Lanjut	Usia Teri		abilitas Terlantar, rta Gelandangan	
SUB KEGIATAN	Pemberian Bimbi Disabilitas Terlan serta Gelandanga	tar, Anak	Terlantar,	Lanjut Us	sia Terlantar,	
KODE PROGRAM	1.06.04					
ANALISIS SITUASI	Data Pembuk     Data Umum	a Wawas	an (Data	Pilah Ger	nder)	
	pengemis, gel Temanggung.	Kegiatan ini berupa pemberian layanan kedaruratan kepada pengemis, gelandangan, dan orang terlantar di Kabupaten Temanggung.  Jumlah Masyarakat yang mendapatkan layanan				
	kedaruratan T			atkan lay	anan	
		Jml	L	Р		
		12	7	5		
		Jumlah Masyarakat yang mendapatkan layanan kedaruratan Tahun 2023				
	Reduirendin	Jml	L	Р		
		92 53 39				
	<ul> <li>Akses         Jumlah PPKS UPTD Rumah Singgah pada tahun 2024 semester 1 tahun 2024 adalah 12 (L=7, P= 5).     </li> <li>Waktu pelaksanaan kegiatan adalah Januari s.d Desember 2025 sesuai kasus yang ada.</li> </ul>					
	<ul> <li>Partisipasi Jumlah personil yang terlibat: - PPTK: 1 orang (L:1, P:0) - Pekerja Sosial: 2 orang (L:1, P:1) - Penyuluh Sosial: 1 orang (L:0, P:1) - Petugas UPTD Rumah Singgah: 5 orang (L:3, P:2) - Petugas kebersihan: 1 orang (P:1)</li> </ul>					

#### Kontrol

- Jumlah pejabat eselon 2 (Kepala Dinas) pada Dinas Sosial KabupatenTemanggung sejumlah 1 (satu) orang ( L)
- Jumlah pejabat eselon 3 (Sekretaris, Kabid) pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sejumlah 3 (tiga) orang (L : 2, P: 1)

#### Manfaat

- Terlaksananya layanan kedaruratan masalah kesejahteraan sosial yang bersifat sementara bagi PPKS sampai dengan dirujuk ke sentra terpadu atau panti sosial atau dipulangkan kepada pihak keluarga yang sesuai dengan jenis permasalahan dan kebutuhannya serta meningkatkan keberfungsian sosial secara optimal.
- Klien PGOT mendapatkan layanan kedaruratan berupa pemenuhan kebutuhan dasar selama di Rumah Singgah seperti makanan, pakaian, obat-obatan dasar, dan tempat tidur.
- Diharapkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, klien PGOT dapat difasilitasi untuk mendapatkan layanan rehabilitasi lanjut.
- Klien PGOT baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperolah layanan kedaruratannya berupa pemenuhan kebutuhan dasar jika sudah masuk menjadi klien Rumah Singgah.

### 2. Issu dan Faktor Kesenjangan Gender

- a. Faktor Kesenjangan disebabkan:
- Klien PGOT yang datang ke Rumah Singgah tidak bisa diprediksikan laki-laki atau perempuan. Pemberian layanan kedaruratan berupa pemenuhan kebutuhan dasar juga sama antara laki-laki dan perempuan.

### Akses

- Persentase penerima manfaat berjenis kelamin perempuan mempunyai persentase yang lebih rendah disbanding laki-laki.
- Persentase pejabat eselon maupun fungsional perempuan di Dinas Sosial lebih tinggi dari laki-laki

### Partisipasi dan kontrol

 Kewenangan pengambilan keputusan untuk hasil evaluasi lebih ditentukan oleh laki - laki.

#### b. Penyebab Internal

- Perencanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran tidak bisa dipilah jumlah sasarannya karena klien PGOT tidak bisa diprediksi sebelumnya.
- c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender
- Kurangnya koordinasi yang intensif dalam penyusunan RKA berbasis gender
- Kurangnya dukungan TAPD dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan RKA yang telah diusulkan oleh PD, sehingga karena tidak terpenuhi di tahun berjalan maka akan di lanjut pada tahun berikutnya

RENCANA AKSI		Pemberian	layanan kedaruratan kepada klien PGOT
		Tujuan	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi klien PGOT selama berada di Rumah Singgah. Mencegah timbulnya permasalahan sosial lainnya yang ditimbulkan oleh klien PGOT apabila tidak segera tertangani.
		Aktivitas	<ul> <li>Melakukan Assesment kepada klien PGOT yang datang ke Rumah Singgah</li> <li>Melakukan rencana intervensi kepada klien PGOT</li> <li>Melakukan Intervensi kepada klien PGOT</li> </ul>
			Melakukan Terminasi
			Dana:Rp. 45.000.000,-
	Kegiatan	Sumber Daya (Input)	PPTK: 1 orang (Kepala UPTD Rumah SInggah) Pekerja Sosial: 2 orang
	A e		Penyuluh Sosial: 1 orang
			Petugas UPTD Rumah Singgah : 5 orang
			Tenaga Kebersihan : 1 orang
			Sarana Prasaran: Ruang Shelter perempuan, Ruang Shelter Laki-laki, Ruang Isolasi, Dapur, Ruang Penjaga, ATK, Komputer, CCTV, Mobil Operasional
		Output	Rumusan Kinerja  Terlaksananya pemberian layanan kedaruratan kepada klien PGOT Indikator Kinerja  Prosentase penerima layanan kedaruratan dengan komposisi PPRG sebesar 100 % belum tercapai karena klien PGOT yang datang tidak bisa diprediksikan.

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

HERI KARDONO, S.STP Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001



## PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS SOSIAL

Jalan Pahlawan Nomor 4A- Kode Pos 56214
Telpon/Faksimile (0293) 491129 SuratElektronik : dinsostmg@yahoo.com

## MATRIKS LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

BARIS 1	NAMA OPD		Dinas	Sosial				
	URUSAN YANG DIA	AMPU	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					
	Program		Rehabilitasi Sosial					
	Kegiatan		Rehabilitasi Sosial Dasar Penya Disabilitas Terlantar, Anak Ter Lanjut Usia Terlantar, serta Geland Pengemis di Luar Panti Sosial					
	Tujuan Kegiatan		ke Ge	rlaksanany daruratan k elandangan GOT)	epada Pe	engemis,		
BARIS 2	Data Pembuka Wawasan (DATA TERPILAH BERDASARKAN JENIS KELAMIN, UMUR ATAU GESI)		Ke lay Pe ter	vanan engemis, G lantar bupatenTe Data Masy laya Daerah	(PG manggun	tan gan, dan OT) g. ing mend ruratan manggun	di apat	
			Г	Jml	L	IIIOOKOI I	Р	
				12	7		5	
					Penerima kedarurat ngan Bula L	tan		
			Or sa (L: • Se Ge	mlah Pengrang Terlar mpai dengrang =7, P=5) ebagian elandangan GOT) adala	ntar (PGC an Maret besar dan C	OT) dari 2024 ada Per Orang T	Januari	
BARIS 3	l k	aktor kesenjangan / permasalahan (452)	• Al-	sesibilitas formasi pada Peng	masyar layananar gemis, Ge	rakat te n keda	erhadap aruratan an, dan masih	

	T		terhatas
			<ul> <li>terbatas</li> <li>Partisipasi masyarakat dalam penanganan terhadap PPKS Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)</li> <li>Kontrol/wewenang Kewenangan pengambilan keputusan untuk hasil evaluasi lebih ditentukan oleh laki laki.</li> <li>Manfaat Berkurangnya isu gender dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan.</li> <li>Marginalisasi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) seringkali direndahkan karena mereka dianggap berbeda dan memiliki kekurangan.</li> <li>Stereotipy anggapan Pengemis,</li> </ul>
		Sebab Kesenjangan Internal (di	Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) adalah orang yang mengganggu.  • Perencanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran tidak bisa dipilah jumlah sasarannya karena
		OPD)	<ul> <li>klien PGOT tidak bisa diprediksi sebelumnya.</li> <li>Jumlah SDM yang mendampingi terbatas</li> <li>Jumlah anggaran kurang signifikan terhadap jumlah yang didampingi</li> </ul>
		Sebab Kesenjangan Eksternal	<ul> <li>Kurangnya koordinasi yang intensif dalam penyusunan RKA berbasis gender</li> <li>Kurangnya dukungan TAPD dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan RKA yang telah diusulkan oleh PD, sehingga karena tidak terpenuhi di tahun berjalan maka akan di lanjut pada tahun berikutnya</li> </ul>
BARIS 4	Tujuan Kegiatan Responsif Gender		<ul> <li>Memastikan OPD telah menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran dengan memberikan akses yang sama antara perempuan dan laki-laki</li> <li>Mendukung terlaksananya tujuan pembangunan nasional</li> </ul>
BARIS 5	Rencana Aksi Uraikan rencana aksi dari kegiatan yang akan dilakukan dan dimasukan dalam RKA		Penerimaan     a. Menerima klien Pengemis,     Gelandangan, dan Orang Terlantar     (PGOT)     b. Melakukan pendataan     c. Memenuhi kebutuhan sandang,     pangan, dan papan sementara     d. Melakukan asesmen pada PGOT

			Melakukan penelusuran		
			<ul> <li>a. Melakukan penelusuran melalui</li> </ul>		
			media sosial berdasarkan hasil		
			asesmen pada PGOT		
			<ul> <li>b. Melakukan penelusuran dengan</li> </ul>		
			rekam sidik jari dan iris mata		
			bekerjasama dengan INAFIS atau		
			Dindukcapil		
			Melakukan rujukan		
			<ul> <li>a. Melakukan rujukan ke fasilitas</li> </ul>		
			kesehatan apabila PGOT		
			memerlukan layanan kesehatan		
			fisik atau jiwa		
			b. Melakukan rujukan ke panti		
			pelayanan sosial apabila PGOT		
			tidak ditemukan keluarganya		
			Melakukan reunifikasi keluarga		
			a. Melakukan reunifikasi keluarga		
			apabila PGOT teridentifikasi		
			identitas dan keluarganya		
BARIS 6	BASE LINE D	ATA	% PGOT yang telah diberikan layanan		
	(DAPAT DILA	KUKAN SEBAGAI	kedaruratan adalah 100% dari PPKS		
	STANDAR YA	NG AKAN	PGOT yang diterima		
	DITETAPKAN	UNTUK YAD)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
KOLOM 7		Output	Indikator Kinerja:		
		20045.0003	Jumlah PGOT yang diterima dan telah		
			diberikan layanan kedaruratan.		
			Target Kinerja:		
	==		75 orang		
	AS	Outcome	Indikator Kinerja:		
	エ		Persentase PGOT yang diterima dan		
	\$		telah diberikan layanan kedaruratan		
	E				
	Š		Target Kinerja:		
	S S		100%		
	PENGUKURAN HASIL	Dampak	Indikator Kinerja:		
	_	West transfer to the control of the	Rasio adanya Pengemis, Gelandangan,		
			dan Orang Terlantar (PGOT)		
			Target Kineria		
	]		Target Kinerja :		

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001



## PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS SOSIAL

Jalan Pahlawan Nomor 4A- Kode Pos 56214
Telpon/Faksimile (0293) 491129 SuratElektronik : dinsostmg@yahoo.com

## PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD TAHUN ANGGARAN	DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG 2025					
PROGRAM	Program Rehabilitasi Sosial					
KEGIATAN	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.					
SUB KEGIATAN	Pemberian Layanan Kedaruratan					
KODE PROGRAM	Kode Kegiatan sesuai RKA-SKPD					
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)     Data Umum     Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan Kedaruratan Tahun 2024					
	Jml L P Jiwa					
	18 12 6					
	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan Kedaruratan Tahun 2023					
	Jml L P Jiwa					
	220 121 99					
	<ul> <li>Akses Jumlah penerima manfaat dari layanan kedaruratan Tahun 2024 sebanyak 18 (L = 12, P=6) Waktu pelaksanaan layanan Pemberian Layanan Kedaruratan pada Januari-Maret Tahun 2024 sesuai kasus yang ada.</li> <li>Partisipasi Jumlah personil yang terlibat dalam pelaksanaan: TKSK: 4 (L=2, P=2) Pendamping Rehabilitasi Sosial: 2 Orang (L=0, P=2) Staff Bidang Rehabilitasi Sosial: 5 Orang (L=1, P=4)</li> <li>Kontrol</li> <li>Jumlah pejabat eselon 2 (Kepala Dinas) pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sejumlah 1 (satu) orang (L)</li> <li>Jumlah pejabat eselon 3 (Sekretaris, Kabid) pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sejumlah 1 (tiga) orang terdiri dari L=1, P=1</li> </ul>					

#### Manfaat

- PPKS yang sebagaian besar mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga kegiatan ini bermanfaat bagi PPKS agar mendapatkan pelayanan sosial sesuai kebutuhan, masalah dan potensi yang dimiliki.
- PPKS baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial

### 2. Issu dan Faktor Kesenjangan Gender

- a. Faktor Kesenjangan disebabkan oleh masih adanya anggapan bahwa laki-laki yang harus diprioritaskan dalam kegiatan-kegiatan, karena laki-laki sebagai tulang punggung keluarga sedangkan perempuan lebih berfungsi sebagai ibu rumah tangga.
- b. Rendahnya SDM anak khususnya perempuan dikarenakan kurangnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki dan adanya pengaruh budaya bahwa "perempuan akhirnya akan kedapur, sumur dan kasur" yang berarti bahwa perempuan itu tdak perlu mengejar pendidikan atau karir tinggi-tinggi karena akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga juga.

#### Akses

- Persentase penerima manfaat berjenis kelamin perempuan mempunyai persentase yang lebih rendah dibanding laki-laki.
- Persentase pejabat eselon maupun fungsional perempuan di Dinas Sosial lebih tinggi dari laki-laki

#### Partisipasi dan kontrol

- Pendamping Sosial ditentukan oleh institusi sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan sehingga membuka peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan
- Kewenangan pengambilan keputusan untuk hasil evaluasi lebih ditentukan oleh perempuan.

#### c. Penyebab Internal

- Perencanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran tidak biasa dipilah jumlah sasarannya karena bersifat respon kasus
- Kegiatan belum didukung anggaran yang memadai untuk mencapai hasil yang maksimal

### d. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender

- Kurangnya koordinasi yang intensif antara tim driver TAPD dalam penyusunan RKA berbasis gender dalam E-planning maupun E-Budgeting.
- Kurangnya dukungan TAPD dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan RKA yang telah diusulkan oleh OPD.

RENCANA AKSI	un	Pemberian Layanan Kedaruratan				
	Kegiatan	Tujuan	Memberikan penanganan secara konstruktif kepada PPKS agar mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan dan			

	permasalahan yang dihadapi.
Aktivitas	<ul> <li>Melakukan koordinasi dan penjangkauan</li> <li>Melakukan asesmen kasus</li> <li>Menyusun rencana intervensi</li> <li>Melaksanakan intervensi sesuai hasil asesmen</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi</li> </ul>
	Dana : Rp 566.611.362,00
Sumban	Panitia: Bidang Rehabilitasi Sosial
Sumber Daya (Inputs)	Trainer :Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial Praktisi
(inputs)	Penerima: berdasarkan respon kasus
	Sarana prasarana :Laptop, ATK.
Output	Rumusan Kinerja     Terlaksananya kegiatan pemberian layanan kedaruratan dengan penerima sesuai dengan respon kasus.      Indikator Kinerja     Prosentase penerima layanan kedaruratan dengan komposisi PPRG sebesar 100 % (dengan asumsi anggaran yang tersedia maksimal untuk penanagan yang ada)

Temanggung,20 Maret 2024 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199912 1 001



## PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS SOSIAL

JalanPahlawan Nomor 4A- Kode Pos 56214
Telpon/Faksimile (0293) 491129 SuratElektronik : dinsostmg@yahoo.com

## MATRIKS LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

KOLOM 1	SKPD	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung				
	Program	Program Rehabilitasi Sosial				
	Kegiatan	<ul> <li>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.</li> </ul>				
	Sub Kegitan	Pemberian Layanan Kedaruratan				
	Tujuan	Terlaksanakannya pemberian layanan kedaruratan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan				
KOLOM 2	Data Pembuka Wawasan ( <i>Data</i> <i>Pilah Gender</i> )	Data Umum     Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan     Kedaruratan Tahun 2024				
		Jml L P Jiwa				
		18 12 6				
		Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan Kedaruratan Tahun 2023				
		Jml L P Jiwa				
		220 121 99				
		<ul> <li>Akses         Jumlah penerima manfaat dari layanan kedaruratan Tahun 2024 sebanyak 18 (L = 12, P=6)         Waktu pelaksanaan layanan Pemberian Layanan Kedaruratan pada Januari-Maret Tahun 2024 sesuai kasus yang ada.     </li> <li>Partisipasi Jumlah personil yang terlibat dalam pelaksanaan:         <ul> <li>TKSK: 4 (L=2, P=2)</li> <li>Pendamping Rehabilitasi Sosial: 2 Orang (L=0, P=2)</li> <li>Staff Bidang Rehabilitasi Sosial: 5 Orang (L=1,</li> </ul> </li> </ul>				

	T		D-4)
			<ul> <li>Fe4)</li> <li>Kontrol         <ul> <li>Jumlah pejabat eselon 2 (Kepala Dinas) pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sejumlah 1 (satu) orang (L)</li> <li>Jumlah pejabat eselon 3 (Sekretaris, Kabid) pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sejumlah 1 (tiga) orang terdiri dari L=1, P=1</li> </ul> </li> <li>Manfaat         <ul> <li>PPKS yang sebagaian besar mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga kegiatan ini bermanfaat bagi PPKS agar mendapatkan pelayanan sosial sesuai kebutuhan, masalah dan potensi yang dimiliki.</li> <li>PPKS baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial</li> </ul> </li> </ul>
Langkah 3	U GENDER	Faktor Kesenjang- an/ Permasalaha n Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat	<ul> <li>Akses         <ul> <li>Persentase penerima manfaat berjenis kelamin perempuan mempunyai persentase yang lebih rendah dibanding laki-laki</li> <li>Persentase pejabat struktural maupun fungsional perempuan di Dinas Sosial lebih tinggi dari laki-laki</li> </ul> </li> <li>Partisipasi dan kontrol         <ul> <li>Pendamping Sosial ditentukan oleh institusi sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki.</li> <li>Kewenangan pengambilan keputusan untuk hasil evaluasi lebih ditentukan oleh perempuan.</li> </ul> </li> <li>Manfaat         <ul> <li>Berkurangnya isu gender dalam pelaksanaan kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan bagi PPKS.</li> </ul> </li> </ul>
Langkah 4	nsi Isu	Sebab Kesenjang- an Internal (di SKPD)	<ul> <li>Perencanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran tidak bisa dipilah jumlah sasarannya karena bersifat respon kasus</li> <li>Kegiatan belum didukung anggaran yang memadai untuk mecapai hasil yang maksimal</li> </ul>
Langkah 5		Sebab Ke- senjangan External	Kurangnya koordinasi yang intensif antara tim driver (Dinas Sosial, Bappeda, BPPKAD) dalam penyusunan RKA berbasis gender dalam E-planning maupun E-Budgeting Kurangnya dukungan TAPD dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan RKA yang telah diusulkan oleh OPD.
Langkah 6	Re	juan sponsif nder	<ul> <li>Memastikan OPD telah menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran dengan memberikan akses yang sama antara perempuan dan laki-laki</li> <li>Tingkat kesejahteraan PPKS meningkat</li> <li>Mendukung terlaksananya tujuan pembangunan</li> </ul>

			nasional
Langkah 7	Pri	ncana Aksi oritas/Kegiata ndikator	Melakukan pelayanan sosial bagi PPKS yang membutuhkan layanan berdasarkan hasil asesmen
Langkah 8	Pengukuran Hasil	Outcome	<ul> <li>Rumusan Kinerja         <ul> <li>Terlaksananya pelayanan sosial bagi PPKS</li> </ul> </li> <li>Indikator Kinerja             <ul></ul></li></ul>
			pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS bermasalah untuk terbebas dari masalah yang dihadapi oleh diri dan keluarganya.  Meningkatnya peran serta dan dukungan masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh PPKS.

Temanggung,20Maret 2024 Kepala Dinas Sosial

TAH Kabupaten Temanggung

HERI KARDONO, S.STP

NIP 19790709 199912 1 001



## PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## **DINAS SOSIAL**

Jalan Pahlawan Nomor 4A Temanggung Kode Pos 56214 Telepon/Faximili 0293 4911: surat elektronik: dinsostmg@yahoo.com laman: www.dinsostemanggungkab.go.id

## PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD

: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

TAHUN ANGGARAN

I AITON ANGGAR	AN . 2025	
PROGRAM	Pemberdayaan Sosial	
KEGIATAN	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	
KODE Kogiatan	Kodo Kogistan assusi DKA SKDD	

KODE Kegiatan

Kode Kegiatan sesuai RKA-SKPD

ANALISIS SITUASI

 Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). DATA UMUM:

√ Kuantitatif

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kab. Temanggung Th 2024 L P 63.192 17.777

Data TKSK Kab Ter	manggung Th 2024
L	Р
15	5

## √ Kualitatif:

TKSK laki-laki dan perempuan memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama;

- Beban kerja, reward and punishment serta penyediaan sarpras pendukung kinerja diberikan secara merata;

 Kegiatan fasilitasi bagi peningkatan kapasitas TKSK dilaksanakan secara merata;

 Kemampuan penguasaan IT yang menjadi kebutuhan pokok dalam kegiatan pendataan dan pelaporan kegiatan lebih dikuasai oleh TKSK perempuan (dinilai dari hasil pengolahan data dan pelaporan kegiatan)

Kemampuan dalam melakukan pendampingan sosial lebih dikuasai oleh TKSK perempuan.

### AKSES:

## √ Sumberdaya alam:

TKSK baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses kebutuhan dengan memanfaat sumber daya alam yang tersedia,kondisi alam Temanggung juga berpengaruh pada penguasaan lapangan TKSK, kemampuan untuk survival di lapangan lebih dikuasai oleh TKSK laki-laki

## √ Sumberdaya manusia :

TKSK laki-laki maupun perempuan memiliki sumber daya manusia yang berbeda-beda, peningkatan SDM melalui berbagai pelatihan dilakukan untuk semua TKSK baik laki-laki maupun perempuan.

## √ Sumberdaya keuangan :

Upah yang diterima TKSK laki-laki dan perempuan memiliki nominal yang sama yang disesuaikan oleh kemampuan daerah.

## √ Ketersediaan layanan pemerintah :

Dukungan sarpras untuk operasional dari pemerintah diberikan sama kepada TKSK laki-laki dan perempuan

## KONTROL:

- Jumlah pejabat eselon 2 (Kepala Dinas) pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sejumlah 1 (satu) orang (L) Jumlah pejabat eselon 3 (kabid) pada
- Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 1 orang (P)
- Dari hal tersebut, Pengambilan keputusan Seimbang antara laki-laki dan perempuan

## MANFAAT:

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh TKSK baik laki-laki maupun perempuan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

KEGIATAN		TKSK LAKI- LAKI	TKSK PEREMPUAN
Koordinasi pro	gram/kegiatan	dilaksanakan dilaksanakan	dilaksanakan dilaksanakan
Pendampinga program/kegia	n		
Kerjasama jejaring sosial	program/kegiatan	dilaksanakan	dilaksanakan

## Issu dan Faktor Kesenjangan Gender. Faktor Kesenjangan yaitu :

## Akses:

- kemampuan penguasaan IT TKSK laki-laki seimbang dengan penguasaan IT TKSK perempuan walaupun ada beberapa TKSK Laki-laki yang penguasaan IT nya lebih rendah namun jumlahnya tidak banyak, - kondisi alam berpengaruh pada kemampuan TKSK untuk
  - mengakses wilayah dan dinominasi TKSK laki-laki tanggungjawab rumah tangga dan keluarga berpengaruh
- pada keterbatasan kegiatan TKSK perempuan;

penyelesaian tugas

- Partisipasi: TKSK perempuan lebih disiplin dalam administrasi dan
  - TKSK laki-laki dapat lebih fleksibel dalam menjangkau masyarakat
  - TKSK laki-laki lebih aktif dalam berjejaring sosial.

Sub Kegiatan 2		Melaksanaka direncanaka	an Bintek sesuai jadwal yang	
		Tujuan	Meningkatkan jumlah TKSK yang mengikuti pengembangan kompetensi	
		Aktivitas	<ul> <li>Melakukan koordinasi dengan nara sumber</li> <li>Menyusun perencanaan dan jadwal pelaksanaan pelatihan</li> <li>Pelaksanaan pelatihan sesuai jadwal</li> </ul>	
		Sumber	Dana : 15.000,000	
		daya (Inputs)	Panitia : Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial dan Staf Bidang pemberdayaan Sosial	
			Trainer : ASN/Non ASN yang mempunyai kompetensi diklat teknis Peserta : TKSK	
			Sarana prasarana : Komputer/ laptop,	
		output	<ul> <li><u>Rumusan Kinerja</u>         Jumlah TKSK yang mengikuti bintek     </li> <li><u>Indikator Kinerja</u>         Prosentase jumlah TKSK yang mempunyai kompetensi diklat teknis     </li> </ul>	
			mempanyai kempetensi dikiat teknis	
ALOKASI	Anggaran	Rp: 15.000.000		
SUMBER DAYA	SDM	Panitia = Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial dan Staf Bidang pemberdayaan Sosial Peserta = TKSK Narasumber = ASN yang mempunyai kompetensi diklat teknis Staf Pendukung = -		
	Peralatan		pelatihan	
	dan Mesin	- IVICUIA	pelatinan	
Outcomes		a jumlah TKSK	Cyang mengikuti bintek	
	Indikator Kin     Prosentase ju		ang mempunyai kompetensi diklat teknis	

TAH KERALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

HERIKARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I NIP 19790709 199912 1 001

# MATRIKS LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY DAN POLICY OUTLOOK FOR PLAN OF ACTION (GAP)

BARIS 1	SKPD	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung		
	Program	Pemberdayaan Sosial	I	
	Kegiatan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosia Daerah Kabupaten/ Kota		
	Sub Kegiatan	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		
	Tujuan	Jumlah TKSK yang terlibat dalam penanga PPKS	nan	
BARIS 2	Data Pembuka Wawasan	Data Umum     Kuantitatif		
	(Data Pilah Gender)	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kab. Temanggung Th 2024		
		L P		
		63.192 17.777		
		Data TKSK Kab Temanggung Th 2024		
		L P		
		15 5		
		diberikan secara merata; 3. Kegiatan fasilitasi bagi peningka kapasitas TKSK dilaksanakan secara merata; 4. Kemampuan penguasaan IT yang mer kebutuhan pokok dalam kegiatan pendat dan pelaporan kegiatan lebih dikuasai	serta nerja atan cara njadi taan oleh hasil n)	
		<ul> <li>Akses         √ Sumberdaya alam :         TKSK baik laki-laki maupun perempuan di mengakses kebutuhan dengan memanfaat sun daya alam yang tersedia,kondisi alam Temanggi juga berpengaruh pada penguasaan lapar TKSK, kemampuan untuk survival di lapangan lidikuasai oleh TKSK laki-laki</li> </ul>	mber gung ngan	

## √ Sumberdaya manusia :

TKSK laki-laki maupun perempuan memiliki sumber daya manusia yang berbeda-beda, peningkatan SDM melalui berbagai pelatihan dilakukan untuk semua TKSK baik laki-laki maupun perempuan. Usia, tingkat pendidikan berpengaruh pada kemampuan penguasaan IT

## √ Sumberdaya keuangan :

Upah yang diterima TKSK laki-laki dan perempuan memiliki nominal yang sama yang disesuaikan oleh kemampuan daerah.

### √ Ketersediaan layanan pemerintah :

Dukungan sarpras untuk operasional dari pemerintah diberikan sama kepada TKSK laki-laki dan perempuan

### Partisipasi

Knowledge: tingkat pendidikan TKSK berbedabeda (SMA – S1), hal ini berhubungan dengan kemampuan penerimaan informasi terkait tugas dan cara penyelesaian tugas.

TINGKA"	T PENDIDIKAN	TKSK LAKI-LAKI
SMA	DIPLOMA	SARJANA
2	4	9

TINGKA'	T PENDIDIKAN	TKSK PEREMPUAN
SMA	DIPLOMA	SARJANA
1	0	4

Attitude: sikap yang dimiliki masing-masing individu. Secara keseluruhan attitude yang dimiliki TKSK baik laki-laki maupun perempuan berpengaruh pada capaian kinerja. Ketepatan, kecepatan dan kedisiplinan TKSK perempuan lebih baik dibandingkan TKSK lakilaki.

Practice: Kemampuan penyelesaian tugas TKSK meliputi proses koordinasi, fasilitasi dan administrasi. Secara keseluruhan, TKSK laki-laki di lapangan lebih aktif dan memiliki jangkauan penerima manfaat serta jejaring kerja yang lebih banyak.

#### Kontrol

- Jumlah pejabat eselon 2 (Kepala Dinas) pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sejumlah 1 (satu) orang (L)
- Jumlah pejabat eselon 3 (kabid) pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 1 orang (P)
- Dari hal tersebut, Pengambilan keputusan seimbang atara laki-laki dan perempuan

#### Manfaat

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh TKSK baik laki-laki maupun perempuan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

	T		KEGIATAN	TKSK LAKI- LAKI	TKSK PEREMPUAN		
			Koordinasi program/kegiatan	dilaksanakan	dilaksanakan		
			Pendampingan program/kegiatan	dilaksanakan	dilaksanakan		
			Kerjasama program/kegiatan jejaring sosial	dilaksanakan	dilaksanakan		
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, Kontrol, Manfaat, Partisipasi)	Akses:  - kemampuan penguasaan IT TKSK laki-laki beberapa lebih rendah dibanding TKSK perempuan namun sebagian lainnya setara bahkan ada yang lebih tinggi,  - kondisi alam berpengaruh pada kemampuan TKSK untuk mengakses wilayah dan dinominasi TKSK laki-laki  - tanggungjawab rumah tangga dan keluarga berpengaruh pada keterbatasan kegiatan TKSK perempuan;  Partisipasi:  - TKSK perempuan lebih disiplin dalam penyelesaian tugas  - TKSK laki-laki dapat lebih fleksibel dalam menjangkau masyarakat  - TKSK laki-laki lebih aktif dalam berjejaring sosial.  Kontrol:  - Narasumber ditentukan oleh institusi sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan  - Kewenangan pengambilan keputusan untuk hasil evaluasi lebih ditentukan oleh perempuan.  Manfaat:				
			Berkurangnya kese pelaksanaan kegia Potensi TKSK				
BARIS 4		Sebab Kesenjangan Internal (di SKPD)	SDM : keterbatasa gender √ Dana : keterba berbagai pelatihan TKSK √ regulasi : belum a pemecahan persoala √ Koordinasi : belum sektoral untuk men pengarusutamaan ge √ Sarpras : keterbatas kapasitas TKSK	atasan dana bagi peningk ada regulasi ya n gender n optimalnya k sinergikan pro	untuk fasilitasi atan kapasitas ang mendukung coordinasi lintas ogram kegiatan		
BARIS 5		Sebab Kesenjangan Eksternal	budaya dan norma mendominasi dan b keterbatasan kegiatan ba	eban ganda			
BARIS 6	Tujua Gende	n Responsif er	<ul> <li>Memastikan OPD melaksanakan PPRG</li> <li>TKSK perempuan da dan pelayanan terhada</li> <li>Mendukung terlaksan nasional</li> </ul>	ipat meningkat ap masyarakat	0.5		

BARIS 7	Rencana Aksi		<ol> <li>Melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan, bintek bagi TKSK</li> <li>Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi rutin terhadap kinerja TKSK</li> </ol>
BARIS 8		Output	Rumusan Kinerja Output:  Pelaksanaan bimbingan teknis, capacity building bagi TKSK  Indikator Kinerja Output:  Prosentase jumlah peserta bimbingan teknis dengan komposisi PPRG
BARIS 9	Pengukuran Hasil		Rumusan Kinerja Outcome:  Meningkatnya kinerja TKSK, diukur dari laporan kegiatan bulanan, yang meliputi deskripsi kegiatan, macam kegiatan,ketepatan waktu penyelesaian tugas.  Indikator Kinerja Outcome:  Semakin banyaknya masyarakat yang terfasilitasi oleh TKSK  Meningkatnya peran serta dan dukungan pemerintah Kecamatan, masyarakat dan PSKS lainnya dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui jejaring sosial

KEPALA DINAS SOSIAL MTATKABURATEN TEMANGGUNG

HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I NIP. 19790709 199912 1 001



## PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS SOSIAL

Jalan Pahlawan Nomor 4A- Kode Pos 56214
Telpon/Faksimile (0293) 491129 SuratElektronik : dinsostmg@yahoo.com

## PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD TAHUN ANGGARAN	DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG 2025				
PROGRAM	Jaminan Sosial				
KEGIATAN	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				
KODE PROGRAM	1.06.05.2.02.04				
ANALISIS SITU <b>ASI</b>	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)     Data Umum     Jumlah Penerima Bantuan Pengembangan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun 2025.				
	Jml L P Jiwa				
	2820 60 2760				
	Jumlah penerima manfaat pengembangan ekonomi Kelompok Usaha Bersama tahun 2025 sebanyak 2820 (L = 60, P=2760)  • Partisipasi Jumlah personil yang terlibat dalam pelaksanaan: - Dinas Sosial: orang (L:6, P:6) - Pendamping KUBE 123 orang (L:41, P:82) - Kecamatan: 20 orang (L:0, P:0) - Pemerintah Desa: 289 orang (L:0, P:0)				
	<ul> <li>Kontrol         <ul> <li>Jumlah pejabat eselon 2 (Kepala Dinas) pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sejumlah 1 (satu) orang (L:1,P:0)</li> <li>Jumlah pejabat eselon 3 (Sekretaris, Kabid) pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sejumlah 2 (dua) orang terdiri dari (L:2P:0)</li> </ul> </li> </ul>				
	Manfaat     Terfasilitasinya penyaluran Bansos untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE).				
	Issu dan Faktor Kesenjangan Gender     Faktor Kesenjangan disebabkan oleh masih ada anggapan bahwa kegiatan pengembangan usaha didominasi oleh perempuan karena perempuan lebih ulet				

			gelola usaha.		
		Akses			
	<ul> <li>Persentase penerima manfaat berjenis kela perempuan mempunyai persentase yang lebih ti dibanding laki-laki.</li> </ul>				
		Persentase			
		Persentase pejabat struktural maupun fungsional perempuan di Dinas Sosial lebih tinggi dari laki-laki.			
	• F	Partisipasi dar			
			nanfaat bantuan sosial UEP KUBE untuk		
			didominasi dari perempuan.		
	• 1	/lanfaat			
		Berkurangny	a isu gender dalam pelaksanaan bantuan		
RENCANA AKSI		sosial penge	mbangan masyarakat.		
KENCANA ANSI			kan penyaluran Bansos UEP KUBE		
		<ul> <li>Melaksa</li> </ul>	anakan Pelatihan/ Bintek kepada UEP KUBE.		
		Tujuan	Memfasilitasi penyaluran dan		
			pendampingan usaha bantuan sosial		
	egiatan	A1.01.14	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)		
		Aktivitas	Melakukan Verval penerima UEP KUBE		
			Melakukan asesmen		
			Menyusun rencana intervensi		
			<ul> <li>Melaksanakan intervensi sesuai hasil asesmen</li> </ul>		
			Melakukan monitoring dan evaluasi		
			inolandian mornioring dan evaluasi		
		SumberDa ya (Inputs)	Dana : Rp.3.452.183.000,-		
			Panitia: Bidang Jaminan Sosial		
			Trainer : Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial		
			Praktisi		
	X		Peserta: 4 orang		
			Sarana prasarana :Laptop, ATK.		
		Output	RumusanKinerja		
			Terlaksananya peyaluran Bansos UEP		
			KUBE.		
			Melaksanakan Pelatihan/Bintek kepada		
			UEP KUBE		
			IndikatorKinerja		
			Prosentase tersalurkan bansos UEP		
			KUBE tercapai sebesar 100%		
			Pelatihan/ Bintek telah dilaksanakan		
			kepada UEP KUBE.		

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

HERI KARDONO, S.STP Pembina Tingkat I NIP 197907091999121001

## MATRIKS LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

BARIS 1	NAMA OPD		Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	
	URUSAN YANG	DIAMPU	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	
	Program		Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	Kegiatan		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
	Tujuan Kegiatan		Memberikan fasilitasi penyaluran dan pendampingan kepada penerima bantuan stimulant Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	
BARIS 2	Data Pembuka Wawasan (DATA TERPILAH BERDASARKAN JENIS KELAMIN, UMUR ATAU GESI)		<ul> <li>Jumlah anggota KUBE yang menerima bantuan stimulan sejumlah 2820 orang</li> <li>Jumlah anggota KUBE berjenis kelamin Perempuan sejumlah 2760 orang</li> <li>Jumlah anggota KUBE berjenis kelamin Laki-laki sejumlah 60 orang</li> </ul>	
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	<ul> <li>Aksesibilatas presentase penerima manfaat berjenis kelamin perempuan mempunyai presentase yang lebih tinggi disbanding laki-laki</li> <li>Partisipasi partisipasi aktif penerima bantuan KUBE lebih didominasi perempuan daripada laki-laki</li> <li>Kontrol/wewenang jumlah pengurus KUBE lebih dominan perempuan karena perempuan dianggap lebih ulet dalam mengembangkan usaha</li> <li>Manfaat Terfasilitasinya bantuan stimulan untuk pengembangan usaha kelompok agar usaha yang sudah dirintis menjadi lebih besar</li> <li>Marginalisasi Pengurus KUBE yang berjenis kelampin laki-laki dianggap kurang giat dan sabar dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya</li> <li>Stereotipy anggapan perempuan lebih baik dalam mengurus usaha dan managemen keuangan daripada lakilaki</li> </ul>	
		Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)	Anggaran belum bisa digunakan secara proporsional karena nominal bantuan masih dirasa kurang dengan jumlah kelompok KUBE yang harus dibantu	
		Sebab Kesenjangan Eksternal	<ul> <li>Masih kurangnya kerjasama antar lini sektor OPD dalam usaha Bersama- sama membangun pada usaha kecil di masyarakat, sehingga cenderung masing-masing OPD berjalan sendiri-</li> </ul>	

			sendiri dan tidak terintegrasi
BARIS 4	Tujuan Kegi Gender	atan Responsif	<ul> <li>Memastikan OPD telah menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja aggaran dengan memberikan akses yag sama antara perempuan dan laki-laki</li> <li>Terfasilitasinya penyaluran bansos UEP KUBE</li> <li>Terlaksananya pelatihan/bintek kepada penerima UEP KUBE</li> </ul>
BARIS 5	kegiatan yar	si cana aksi dari ng akan dilakukan kan dalam RKA	<ul> <li>Melakukan penyaluran bansos UEP KUBE</li> <li>Melaksanakan pelatihan/bintek kepada KUBE</li> </ul>
BARIS 6	BASE LINE DATA		Jumlah anggota KUBE yang akan dibantu pada Tahun 2025 sejumlah 2760 orang
KOLOM 7		Output	Indikator Kinerja: Terlaksananya pelatihan/bintek kepada KUBE Target Kinerja: 100%
	PENGUKURAN HASIL	Outcome	Indikator Kinerja: Terlatihnya calon penerima UEP KUBE dan tersalurkannya bansos KUBE Target Kinerja: 2820 orang (141 KUBE)
	PENG	Dampak	Indikator Kinerja: Terfasilitasinya modal pengembangan usaha bagi kelompok KUBE dalam menjalankan usaha yang sudah dimulai Target Kinerja: Terpenuhinya bantuan stimulan kepada 141 KUBE

KEPALA DINAS SOSIAL

HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I NIP: 197907091999121001



# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS SOSIAL

Jalan Pahlawan Nomor 4A- Kode Pos 56214 Telpon/Faksimile (0293) 491129 SuratElektronik : dinsostmg@yahoo.com

## PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

(GENDER BUDGET STATEMENT)					
SKPD TAHUN ANGGARAN	DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG 2025				
PROGRAM	Jaminan Sosial				
KEGIATAN	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				
KODE PROGRAM	1.06.05				
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)     Data Umum     Jumlah Anak-anak dalam perlindungan dan pengasuhan Panpada tahun 2025.				
	Jml L P Jiwa				
	326 111 215				
	<ul> <li>Akses     Jumlah penerima manfaat dari Permakanan Anak dalam     Panti tahun 2025 sebanyak 326 (L = 111, P=215)     Waktu pelaksanaan Permakanan Anak dalam Panti Asuhan     pada Januari-Desember Tahun 2025</li> <li>Partisipasi     Jumlah personil yang terlibat dalam pelaksanaan:     - Dinas Sosial: 1 orang (L: 0, P: 1)     - Pengurus Panti: 76 orang (L: 26, P: 50)</li> <li>Kontrol</li> </ul>				
	<ul> <li>- Jumlah pejabat eselon 2 (Kepala Dinas) pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sejumlah 1 (satu) orang (L)</li> <li>- Jumlah pejabat eselon 3 (Sekretaris, Kabid) pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sejumlah 2 (dua) orang terdiri dari L : 2 P: 0</li> </ul>				
	<ul> <li>Manfaat         <ul> <li>Kebutuhan dasar hidup anak dan perawatan sehari hari anak dalam perlindungan dan pengasuhan Panti dapat terpenuhi dengan baik.</li> <li>Penerima manfaat baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial khususnya bagi Permakanan Anak dalam Panti.</li> </ul> </li> </ul>				
	2. Issu dan Faktor Kesenjangan Gender				

Faktor kesenjangan disebabkan Lembaga Kesejahteraan

		sasaran LKS Akses	k didominan untuk perempuan sehingga an di dalam LKSA juga menyesuaikan dengan SA yaitu perempuan.
			penerima manfaat berjenis kelamin mempunyai persentase yang lebih tinggi ki-laki.
		<ul> <li>Presentase kelamin pere</li> </ul>	pengurus Panti/LKSA lebih dominan berjenis
	•	perempuan o Partisipasi dar	di Dinas Sosial lebih tinggi dari laki-laki.
		<ul> <li>Kewenangar</li> </ul>	pengambilan keputusan untuk hasil evaluasi kan oleh perempuan.
RENCANA AKSI		Berkurangnya sosial Permak	isu gender dalam pelaksanaan bantuan anan Anak dalam Panti.
RENCANA ANSI		Pemeliharaan	Anak-Anak Terlantar
		Tujuan	Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari anak-anak dalam perlindungan dan pengasuhan Panti (pangan, air bersih, perawatan sehari-hari) agar taraf kesejahteraan hidupnya terpenuhi secara wajar.
	ıtan	Aktivitas	<ul> <li>Melakukan koordinasi dan penjangkauan</li> <li>Melakukan asesmen</li> <li>Menyusun rencana intervensi</li> <li>Melaksanakan intervensi sesuai hasil asesmen</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi</li> </ul>
	Kegiatan		Dana : Rp.1.126.000.000,-
	¥	SumberDay a (Inputs)	Panitia: Bidang Jaminan Sosial Trainer: Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial Praktisi Peserta: 4 orang
			Sarana prasarana :Laptop, ATK.
		Output	RumusanKinerja Terlaksananya penjangkauan kepada anak-anak terlantar. IndikatorKinerja Prosentase penerima manfaat Permakanan Anak dalam Panti terpenuhi sebesar 100%

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

HERIKARDONO, S.STP Pembina Tingkat I NIP 197907091999121001

## MATRIKS LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

BARIS 1	NAMA OPD		Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	
	URUSAN YANG	DIAMPU	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	
	Program		Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	Kegiatan		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
	Tujuan <b>Kegiatan</b>		<ul> <li>Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari anak-anak dalam perlindungan dan pengasuhan Panti (pangan, air bersih, perawatan seharihari) agar taraf kesejahteraan hidupnya terpenuhi secara wajar.</li> <li>Tumbuhnya kepedulian keluarga dan masyarakat terhadap anak-anak dalam Panti Asuhan.</li> </ul>	
BARIS 2	Data Pembuka Wawasan (DATA TERPILAH BERDASARKAN JENIS KELAMIN, UMUR ATAU GESI)		<ul> <li>Jumlah Anak-Anak dalam perlindungan dan pengasuhan Panti sejumlah 326 Anak</li> <li>Jumlah Anak berjenis kelamin Perempuan sejumlah 215</li> <li>Jumlah Anak berjenis kelamin laki-laki sejumlah 111</li> </ul>	
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	<ul> <li>Aksesibilatas anak-anak panti mendapatkan aksesibilitas terhadap segala fasilitas yang ada dalam panti dan bantuan social yang diberikan</li> <li>Partisipasi Anak-anak panti memiliki partisipasi yang sama baik perempuan maupun laki-laki seperti</li> <li>Kontrol/wewenang jumlah pengurus panti berjenis kelamin perempuan lebih dominan karena lebih banyak pegurus panti berjenis kelamin wanita sejumlah 50 dan jenis kelamin laki-laki sejumlah 26</li> <li>Manfaat Kebutuhan dasar hidup anak dan perawatan sehari hari anak dalam perlindungan dan pengasuhan Panti dapat terpenuhi dengan baik</li> <li>Marginalisasi Anak-anak Panti selalu direndahkan karena mereka berasal dari keluarga miskin.</li> <li>Stereotipy anggapan bahwa anakanak panti adalah anak yang tertinggal dan kurang mendapatkan pendidikan.</li> </ul>	
		Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)	<ul> <li>Belum memiliki database anak panti</li> <li>Persebaran anak-anak panti bukan hanya berasal dari Kabupaten Temanggung saja</li> <li>Jumlah SDM yang mendampingi terbatas</li> </ul>	
			terbatas	

BARIS 4	Kesenjangan Eksternal  Tujuan Kegiatan Responsif Gender		<ul> <li>ditengah waktu sudah meninggalkan panti saat bantuan telah diberikan</li> <li>Meningkatkan kemampuan dan ketahanan kelaurga pekerja migran dan anak-anak dalam menghadapi bully dan cercaan masyarakat</li> <li>Meningkatkan pemenuhan ekonomi</li> </ul>
BARIS 5	Rencana Aksi Uraikan rencana aksi dari kegiatan yang akan dilakukan dan dimasukan dalam RKA		<ul> <li>Melakukan penjangkauan kepada anak-anak terlantar</li> <li>Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar</li> </ul>
BARIS 6	BASE LINE DATA		Jumlah Anak-Anak dalam perlindungan dan pengasuhan Panti yang akan mendapatkan bantuan permakanan panti sejumlah 326 Anak
KOLOM 7	PENGUKURAN HASIL	Output	Indikator Kinerja: Prosentase terlaksananya penjangkauan dan pemantauan kepada anak terlantar Target Kinerja: 100%
		Outcome	Indikator Kinerja: Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari anak dalam perlindungan dan pengasuhan Panti Target Kinerja: 326 Anak
	PEN	Dampak	Indikator Kinerja: Terpenuhinya gizi bagi anak-anak panti dengan mendapatkan bantuan permakanan anak panti  Target Kinerja:
			Terpenuhinya bantuan permakanan anak panti kepada sejumlah 326 anak panti

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I NIP. 197907091999121001